

PENANDA IDENTITAS DALAM PENAMAAN WILAYAH ADMINISTRASI DI KABUPATEN SANGGAU

Satwiko Budiono¹, Winci Firdaus²

Badan Riset dan Inovasi Nasional ^{1,2}

satwiko.budiono@brin.go.id¹, wincifirdaus1@gmail.com²

Abstract

The identity marker of a society can be seen from the language and culture. A group of people who lives in an area usually names its territory with their language and cultural characteristics of the place. However, the heterogeneity in Indonesia makes the naming of regions experience changes and shifts over time. This can be seen from the naming of the administrative area in Sanggau Regency, West Kalimantan Province. As a border area between Indonesia and Malaysia, the naming of administrative areas becomes necessary to be preserved as an identity marker. In this regard, this study explores the naming of administrative areas in the Sanggau Regency. This study aims to describe the patterns of naming the administrative areas as language documentation, explore the identity markers, and preserve language and cultural characteristics in the administrative areas. The research method is based on toponymy research with descriptive qualitative analysis. Data were collected by using questionnaires and interviews. The research data includes the naming of sub-village, village, and districts in the Sanggau Regency, West Kalimantan Province. The research respondents were 50 people who were selected proportionally based on their language and ethnicity. The results of this study show that the naming of administrative areas in the Sanggau Regency has several semantic categories, such as fruit, rivers, trees or plants, places, people, ethnics, objects, and animals. In terms of language, the naming of the administrative areas comes from Malay, Dayak, Javanese, and Indonesian. This result was obtained from local knowledge, although not all administrative area names were explored. The number of administrative areas that have not been explored makes language documentation efforts need to be followed up by the local government.

Keywords: toponymy research, administrative names, language documentation

Abstrak

Penanda identitas suatu kelompok dapat terlihat dari bahasa dan budayanya. Suatu kelompok yang tinggal dalam suatu wilayah biasanya menamakan wilayahnya dengan menggunakan bahasa dan kekhasan budaya tempat tersebut. Meskipun demikian, heterogenitas dalam masyarakat di Indonesia membuat penamaan wilayah mengalami perubahan dan pergeseran seiring berkembangnya waktu. Hal tersebut dapat terlihat dari penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, penamaan wilayah administrasi menjadi perlu dilindungi sebagai penanda identitas. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menelusuri penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan pola penamaan wilayah administrasi, mengeksplorasi penanda identitas dalam penamaan wilayah administrasi, dan melindungi kekhasan bahasa dan budaya dalam penamaan wilayah administrasi. Metode penelitian berdasarkan penelitian toponimi dengan analisis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Data penelitian mencakup penamaan dusun, desa, dan kecamatan di Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat. Responden penelitian sebanyak 50 orang yang dipilih secara proporsional berdasarkan bahasa dan sukunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau memiliki beberapa kategori semantis, seperti buah, sungai, pohon atau tanaman, tempat, orang, suku, benda, dan binatang. Dari segi bahasanya, penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau berasal dari bahasa Melayu, Dayak, Jawa, dan Indonesia. Hasil ini didapat dari pengetahuan lokal setempat walaupun tidak semua penamaan wilayah administrasi tereksplorasi. Banyaknya penamaan wilayah administrasi yang belum tereksplorasi membuat upaya dokumentasi bahasa perlu mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah setempat.

Kata kunci: toponimi, penamaan wilayah administratif, dokumentasi bahasa

PENDAHULUAN

Penanda identitas suatu kelompok dapat terlihat dari bahasa dan budayanya. Suatu kelompok yang tinggal dalam suatu wilayah biasanya menamakan wilayahnya menggunakan bahasa dan kekhasan budaya tempat tersebut. Meskipun demikian, adanya heterogenitas dalam masyarakat di Indonesia membuat penamaan wilayah mengalami perubahan dan pergeseran seiring berkembangnya waktu. Salah satu faktor yang membuat adanya perubahan dan pergeseran tersebut adalah program transmigrasi di Indonesia. Dalam hal ini, program transmigrasi di Indonesia memiliki peran dalam upaya penyebaran penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang sepi penduduk. Hal ini membuat banyak pendatang di daerah yang masih sepi penduduk. Sebagian besar pendatang berasal dari Pulau Jawa dan Bali, sedangkan daerah yang menjadi lokasi transmigrasi adalah Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Program transmigrasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Program transmigrasi ini mempunyai maksud untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran maupun masyarakat di sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Maksud dari program transmigrasi yang baik dari segi sosial dan ekonomi tersebut ternyata mempunyai dampak dari segi bahasa dan budaya setempat. Hal tersebut terlihat dari penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau menjadi perlu dan penting dilindungi sebagai penanda identitas. Hal ini disebabkan pembangunan kawasan perbatasan masih sebatas infrastruktur, ekonomi, dan pertahanan keamanan saja. Sementara itu, pembangunan kebudayaan di kawasan perbatasan belum banyak dilakukan jika merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Padahal, pembangunan kebudayaan di kawasan perbatasan juga tidak kalah penting karena pembangunan kebudayaan termasuk ke dalam prioritas nasional di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2022. Dengan adanya kebijakan tersebut, penelitian toponimi seperti pada penelitian ini yang termasuk ke dalam pembangunan kebudayaan perlu digalakkan khususnya di kawasan perbatasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berupaya menelusuri penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu kawasan perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Penelitian ini bertujuan (1) mendokumentasikan pola penamaan wilayah administrasi, (2) mengeksplorasi

penanda identitas dalam penamaan wilayah administrasi, dan (3) melindungi kekhasan bahasa dan budaya dalam penamaan wilayah administrasi. Penelitian toponimi wilayah ini dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan bahasa dan mengembangkan penanda identitas budaya melalui penamaan wilayah administrasi. Hal ini disebabkan penamaan wilayah administrasi seringkali kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah terkait makna dan dasar penamaannya. Kondisi demikian membuat penamaan wilayah baru cenderung memiliki perbedaan pola dan karakteristik dari penamaan sebelumnya. Padahal, penamaan wilayah ini dapat menjadi penanda identitas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama di kawasan perbatasan. Pemunculan kekhasan penamaan wilayah di kawasan perbatasan ini penting sebagai penanda jati diri bangsa supaya dapat menjadi bahan penguatan dasar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika ada konflik kewilayahan di masa yang akan datang.

Penelitian yang mengkaji penamaan wilayah administrasi seperti penamaan desa sudah ada sebelumnya. Mulai dari penelitian Izar, dkk (2021), Oktaviana (2020), hingga Permata & Syahrani (2015). Pada penelitian Izar, dkk (2021) menggunakan pendekatan etnografi dengan fokus pada penamaan dan aspek penamaannya saja. Ruang lingkup penelitian tersebut juga terbatas pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Taman Rajo di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dapat dikatakan, penelitian ini lebih condong kepada asal usul penamaannya saja sementara bahasa dari penamaan wilayahnya tidak dijelaskan. Pada penelitian Oktaviana (2020) menggunakan pendekatan linguistik antropologi dengan fokus analisis pada proses morfologis penamaan desa. Ruang lingkup penelitian pun terbatas pada satu kecamatan di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Aspek toponimi dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan sejarah dari hasil wawancara. Pada penelitian Permata & Syahrani (2015) menggunakan pendekatan toponimi dengan fokus pada aspek semantik penamaan desa. Ruang lingkup penelitian terbatas pada satu kecamatan di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menekankan makna penamaan desa berdasarkan bahasanya. Dari ketiganya, penelitian toponimi yang ada lebih mengarah kepada linguistik antropologi atau etnolinguistik. Ruang lingkup penelitian ketiganya pun masih terbatas pada satu sampai dua kecamatan. Aspek bahasa dalam penamaan desa tidak semua dijadikan sebagai bagian dari analisis.

Beberapa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian toponimi yang melakukan penelusuran penamaan semua desa di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tidak hanya itu, penamaan dusun maupun kecamatan juga tidak luput dalam penelusuran penamaan wilayah administrasi pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan toponimi dengan menelusuri makna penamaan wilayah administrasi berdasarkan etimologi bahasanya. Hal ini disebabkan penelusuran penamaan tempat dari sudut pandang sejarah dapat menghasilkan beberapa versi tergantung dari sudut pandang informan. Kondisi demikian dapat memicu konflik atau ketidakberterimaan salah satu pihak. Hal berbeda dengan penelusuran penamaan wilayah administrasi berdasarkan etimologi bahasanya. Penelusuran penamaan wilayah administrasi dari segi bahasa dapat meminimalisasi perbedaan sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif. Hal yang tidak kalah penting yang menjadi kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini turut menganalisis penamaan wilayah administrasi di ruang publik yang dikaitkan dengan standarisasi penamaan rupabumi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang tertuang

dalam Gazeter Republik Indonesia (Badan Informasi Geospasial, 2021). Tentunya, hal ini yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini menjadi menarik dan penting dalam rangka perlindungan bahasa maupun penyelenggaraan penamaan rupabumi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal yang dimaksud adalah penelitian melakukan analisis interpretatif untuk menemukan pola perilaku dan pemikiran. Dari hal tersebut, analisis menggambarkan deskripsi dari partisipan, latar, maupun peristiwa yang terjadi atau data yang terkumpul sebagai pendukung (Heigham and Croker, 2009). Tidak ada metode kuantitatif dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan penelitian ini tidak melibatkan angka maupun penghitungan apapun dalam pembahasannya. Analisis lebih kepada interpretasi responden dari sudut pandang kebahasaannya yang dikategorikan dan dideskripsikan menjadi satu kesatuan sehingga dapat membentuk pola penamaan wilayah administrasi dan aplikasinya dalam penamaan di ruang publik dalam aturan penyelenggaraan penamaan rupabumi di Indonesia. Di sisi lain, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara (Erikha, F., Budiono, S., Dewi, S., Saputri, T. D., Yulianti, S., & Ferdiansyah, 2021). Responden mengisi kuesioner terlebih dahulu berdasarkan pengetahuan lokal dan bahasa yang dikuasai dari penamaan wilayah administrasi yang ada. Setelah itu, responden yang potensial atau responden yang lebih banyak mengisi kuesioner diwawancara secara mendalam supaya mendapatkan pola penamaan wilayah administrasi yang tepat dan sesuai maupun melakukan verifikasi ketidakonsistenan pengisian kuesioner dari beberapa responden lain. Selain itu, data penelitian ini mencakup penamaan wilayah administrasi mulai dari penamaan dusun, desa, hingga kecamatan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Banyaknya penamaan wilayah administrasi membuat penelitian ini mengambil 50 responden supaya mendapatkan hasil data penamaan wilayah administrasi yang banyak pula. Responden yang mengisi kuesioner dipilih secara acak oleh pemerintah daerah setempat dengan mempertimbangkan keberagaman suku dan tingkatan usia yang merepresentasikan sebaran penduduk di Kabupaten Sanggau. Selain itu, responden potensial yang diwawancara secara mendalam dipilih dengan usia >50 tahun supaya dapat memberikan penjelasan yang komprehensif.

Dalam kuesioner dan wawancara, penelitian ini mengacu kepada pertanyaan toponim dan elemen dasar toponim dari Tent (2015). Pertanyaan toponim dan elemen dasar toponim terbagi atas (1) unsur generik dan spesifik dari penamaan, (2) makna dari penamaan, dan (3) bahasa apa yang digunakan dalam penamaan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu kepada UNGEGN (2006). Dalam sumber tersebut dijelaskan bahwa seorang peneliti yang baik berusaha mendapatkan pemahaman penuh tentang setiap penamaan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Mulai dari sejarah toponim atau entitas geografi yang mengikutinya, bahasa yang digunakan dan bentuk penulisan penamaannya, variasi penamaan dan ejaan, aspek kepentingan suku, budaya, atau politik, penggunaan aspek kedaerahan dari penamaan, keandalan penggunaan penamaan, hingga pilihan penamaan yang berkaitan dengan standarisasi. Beberapa hal tersebut menjadi dasar analisis dalam pembahasan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian ini menitikberatkan pada bahasa, makna, dan sistem penulisannya dalam ruang publik. Hal ini disebabkan penamaan rupabumi memuat salah satu unsur penamaan yang menyangkut bahasa, baik sistem penulisan maupun pengucapan (Jakir, Z., Hecimovic, Z.,

2011). Unsur penamaan tentang bahasa ini yang belum tereksplorasi dengan baik sehingga adanya penelitian ini dapat memperkaya unsur penamaan, baik dalam kaitan dokumentasi bahasa maupun identifikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengumpulan data, penelitian ini mendapatkan beberapa informasi penting dalam penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun tidak semua penamaan wilayah administrasi tereksplorasi oleh responden dalam penelitian ini, tetapi informasi pola penamaannya sudah dapat tergambarkan dengan jelas. Hal yang menarik adalah banyak dari responden tidak mengetahui makna penamaan wilayah administrasi walaupun responden tersebut termasuk ke dalam bagian dari suku dan penutur bahasa yang sama dengan penamaan wilayah administrasinya. Padahal, penelitian ini sengaja memilih responden yang berusia 50 tahun ke atas supaya penamaan wilayah administrasinya dapat tereksplorasi dengan baik. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mencari tambahan data pendukung dari berbagai sumber sekunder untuk dapat melengkapi kekurangan informasi dari responden. Salah satu sumber sekunder penelitian ini adalah laporan penamaan rupabumi (Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2015). Dalam laporan tersebut, tidak semua makna dan asal bahasa dari penamaan wilayah administrasi terisi. Sebagian besar juga lebih cenderung kepada sejarah terbentuknya wilayah administrasi, bukan makna penamaan wilayah administrasinya. Meskipun demikian, sumber sekunder tersebut memperkaya pola penamaan wilayah administrasi yang ada.

Dari sumber primer maupun sekunder, dapat diketahui bahwa ketidaktahuan masyarakat, khususnya responden dalam mengisi kuesioner penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat karena ketidakdekatan masyarakat terhadap daerah aliran sungai dan ketiadaan wujud dari sesuatu atau benda yang dijadikan penamaan wilayah administrasi tersebut. Hal yang dimaksud di sini adalah pemukiman masyarakat sudah mulai jauh dari daerah aliran sungai akibat dari bertambahnya penduduk sehingga pemukiman menyebar ke daerah perbukitan. Pertambahan penduduk tersebut ternyata berdampak kepada ketidakdekatan masyarakat dengan daerah aliran sungai dan membuat masyarakat tidak mengenali kosakata berbagai hal yang dekat atau berhubungan dengan sungai. Hal ini dirasa wajar karena masyarakat di Kabupaten Sanggau sudah tidak mengandalkan kehidupannya di sungai maupun menggunakan sarana transportasi air lagi. Pemukiman masyarakat lebih dekat dengan jalan raya dan menggunakan sarana transportasi darat dalam kehidupan sehari-harinya. Adanya perubahan karakteristik pemukiman dan pergeseran sarana transportasi masyarakat turut membuat ketiadaan wujud dari sesuatu atau benda yang khas di daerah aliran sungai tersebut. Terlebih lagi, banyaknya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau sebagai kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia ikut menambah cepat perubahan dan pergeseran tersebut.

Dalam hal ini, sebagian besar penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau mengambil penamaan dari sesuatu yang dekat dengan sungai. Kondisi demikian dapat terlihat dari kategori penamaan wilayah administrasi berdasarkan berbagai sumber dalam penelitian ini. Beberapa kategori penamaan wilayah administrasi tersebut adalah kategori penamaan sungai, pohon atau tanaman, buah, suku, tempat, orang, benda, hingga binatang. Dari beberapa kategori tersebut, kategori penamaan sungai, pohon atau tanaman, dan buah menjadi kategori penamaan

terbanyak dari hasil identifikasi dalam penelitian ini. Temuan ini menjadi relevan dengan kondisi ketidaktahuan masyarakat terhadap penamaan wilayah administrasi yang lainnya. Penamaan wilayah administrasi lain yang belum teridentifikasi dapat saja masih berkaitan dengan ketiga kategori penamaan dominan tersebut. Namun, ketidakdekatan masyarakat terhadap daerah aliran sungai dan ketiadaan wujud dari sesuatu atau benda di sekitar sungai menjadi salah satu faktor ketidaktahuan masyarakat sehingga masyarakat yang dijadikan responden hanya mengetahui sebagian kecilnya saja. Sebaliknya, penamaan wilayah administrasi yang berhasil teridentifikasi dalam penelitian ini dapat diasumsikan keberadaan wujud dari sesuatu atau benda di sekitar sungai masih ada sehingga masyarakat masih dapat mengenali makna penamaan wilayah administrasinya.

Penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil teridentifikasi memiliki beberapa kategori. Meskipun demikian, pada tulisan ini tidak membahas semua kategori dalam penamaan wilayah administrasi yang teridentifikasi. Penamaan wilayah administrasi yang dominan saja yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, seperti kategori penamaan sungai, pohon atau tanaman, dan buah. Hal ini disebabkan terbatasnya pembahasan sehingga tidak semua kategori penamaan wilayah administrasi mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Selain itu, pembahasan juga mengarah kepada penamaan wilayah administrasi di ruang publik yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi. Beberapa kategori penamaan wilayah administrasi lainnya, seperti kategori penamaan suku, tempat, orang, benda, dan binatang hanya disebutkan salah satu contohnya saja. Contoh dari kategori penamaan suku adalah Desa Hibun. Penamaan wilayah administrasi ini diambil dari penamaan salah satu suku Dayak Hibun yang ada di Kabupaten Sanggau. Contoh dari kategori penamaan tempat adalah Kecamatan Balai. Penamaan wilayah administrasi ini diambil dari penamaan bangunan rumah tempat pertemuan. Contoh dari kategori penamaan benda adalah Desa Teraju. Penamaan wilayah administrasi ini memiliki makna timbangan emas atau neraca. Contoh dari kategori penamaan binatang adalah Desa Sebuduh. Penamaan wilayah administrasi ini memiliki makna sungai yang banyak binatang *bedeuh* atau labi-labi.

Kategori Penamaan Sungai

Penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau memiliki dominasi kategori penamaan sungai. Hal ini disebabkan ada 24 penamaan yang teridentifikasi mengandung unsur sungai. Jumlah ini terbilang banyak dibandingkan kategori penamaan lainnya yang teridentifikasi dengan jumlah yang lebih sedikit. Dari kategori penamaan sungai, dapat terlihat bahwa sebagian besar teridentifikasi penamaannya diambil dari sungai yang ada maupun melewati wilayah tersebut. Meskipun demikian, makna penamaan sungai tersebut tidak diketahui. Misalnya, Kecamatan Kapuas yang diambil dari penamaan Sungai Kapuas. Makna dari “Kapuas” itu sendiri tidak diketahui oleh masyarakat. Berhubung wilayah tersebut berada di daerah aliran Sungai Kapuas sehingga wilayahnya dinamakan dengan penamaan yang sama dengan penamaan sungai. Pola penamaan wilayah administrasi ini paling banyak ditemukan di Kabupaten Sanggau. Hal ini tidak mengherankan karena pola penamaan wilayah administrasi seperti ini dapat memudahkan masyarakat mengetahui letak wilayah tersebut. Selain itu, sungai menjadi bagian yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penamaan sungai menjadi penanda identitas tersendiri di Kabupaten Sanggau ini.

Tabel 1. Daftar Kategori Penamaan Sungai

No.	Jenis Toponim	Toponim	Nama Generik	Nama Spesifik	Makna
1	Desa	Pampang Dua	Pampang: cabang	Dua: jumlah	Cabang dua atau wilayah yang memiliki sungai bercabang dua
2	Desa	Kuala Rosan	Kuala: muara	Rosan: tempat persinggahan	Muara sungai yang biasa digunakan sebagai tempat persinggahan
3	Desa	Kuala Buayan	Kuala: muara	Buayan: buaian	Muara sungai yang biasa digunakan sebagai tempat buaian
4	Desa	Meranggau		Meranggau: nama sungai	Nama sungai yang membentang di tengah desa
5	Desa	Tanjung Kapuas	Tanjung: daratan yang menjorok ke sungai	Kapuas: nama sungai	Daratan yang menjorok ke Sungai Kapuas
6	Desa	Lape		Lape: nama sungai	Nama sungai yang membelah desa
7	Desa	Semuntai	Sei: sungai	Muntai: suku dan etnis menjadi satu	Sungai yang mengalir di wilayah suku dan etnis menjadi satu
8	Desa	Kedukul		Kedukul: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
9	Desa	Engkode		Engkode: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
10	Desa	Terati		Terati: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
11	Desa	Kampuh		Kampuh: nama sungai	Nama sungai yang berada di hulu desa
12	Desa	Emberas	Em: sungai	Beras: bertahan hidup	Sungai yang digunakan sebagai tempat bertahan hidup
13	Desa	Mobui		Mobui: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
14	Desa	Kuala Dua	Kuala: muara	Dua: jumlah	Desa yang memiliki dua muara sungai
15	Desa	Empoto	Em: sungai	Poto: (P) Persatuan, (O) Organisasi, (TO) Toyat Mongki	Sungai yang mengalir di wilayah Persatuan Organisasi Toyat Mongki
16	Desa	Idas		Idas: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
17	Desa	Noyan		Noyan: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa

No.	Jenis Toponim	Toponim	Nama Generik	Nama Spesifik	Makna
18	Desa	Sotok		Sotok: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
19	Desa	Kenaman		Kenaman	Nama sungai yang ada di desa
20	Desa	Entikong	En: sungai	Ntekung: tikungan	Tikungan sungai
21	Dusun	Entabang	En: sungai	Tabang: nama anak sungai Tabok	Sungai yang mengalir di anak sungai Tabok
22	Dusun	Landau		Landau: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
23	Kecamatan	Kapuas		Kapuas: nama sungai	Nama sungai yang ada di desa
24	Kecamatan	Kembayan		Kembayan: nama sungai	Nama sungai perbatasan dengan Malaysia

Meskipun demikian, tidak semua penamaan wilayah administrasi yang diambil dari penamaan sungai mencantumkan kata “sungai”. Hal ini menjadi menarik karena ada ketidakonsistenan penulisan penamaan wilayah administrasi yang memiliki kesamaan makna yang didasarkan pada penamaan sungai. Ada penamaan wilayah administrasi yang mencantumkan kata “sungai”, baik dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Sebaliknya, ada pula penamaan wilayah administrasi yang tidak mencantumkan kata “sungai”. Sebagai contoh, Desa Semuntai, Desa Emberas, dan Desa Entabang. Penamaan Desa Semuntai mengandung unsur generik *sei* dari bahasa Melayu memiliki arti sungai. Penamaan Desa Emberas mengandung unsur generik *em* dari bahasa Dayak memiliki arti sungai. Penamaan Desa Entabang mengandung unsur generik *en* dari bahasa Golik memiliki arti sungai. Pola penamaan seperti tersebut lazim di Indonesia. Hal ini disebabkan pola penamaan tersebut juga digunakan penutur bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat dengan penanda *ci* pada Sungai Ciliwung maupun penutur bahasa Lampung di Provinsi Lampung dengan penanda *way* pada Sungai Waypenet. Penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau menjadi lebih memiliki kekhasan apabila ditambahkan penanda identitas seperti *sei*, *em*, atau *en* tergantung dari dominasi masyarakat di wilayah tersebut menggunakan bahasanya selama mengambil penamaan sungai. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui makna penamaan dan menyeragamkan pola penamaan wilayah administrasi yang ada.

Berikutnya, kategori penamaan yang teridentifikasi terbanyak kedua adalah kategori penamaan pohon atau tanaman. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sanggau sebagian besar merupakan wilayah hutan yang masih memiliki banyak pohon atau tanamannya. Tentu saja, wilayah hutan ini masih dekat dengan daerah aliran sungai. Hal ini disebabkan sungai menjadi akses satu-satunya yang menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya sebelum adanya pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan raya aspal seperti sekarang ini. Berikut di bawah ini penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau yang memiliki kategori penamaan pohon atau tanaman.

Kategori Penamaan Pohon atau Tanaman

Dari penamaan wilayah administrasi, dapat terlihat bahwa Kabupaten Sanggau banyak memiliki pohon kayu yang beragam penamaannya. Mulai dari pohon kayu dangin (Desa Sungai Dangin),

pohon kayu mongan (Desa Semongan), pohon kayu meranti (Desa Sejuah), pohon kayu mali (Desa Temiang Mali), pohon kayu bunut (Desa Tanjung Bunut), pohon kayu tapang (Desa Tapang Dulang), pohon kayu tanap (Desa Tanap), pohon kayu ubah (Desa Subah), dan pohon kayu upe (Desa Upe). Hal ini menandakan bahwa pola penamaan di Kabupaten Sanggau juga diambil dari pohon yang tumbuh di sekitar sungai. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya penggabungan unsur sungai maupun hal yang berkaitan dengan sungai dalam kategori penamaan pohon kayu ini. Penamaan pohon kayu tersebut dijadikan penamaan wilayah sebagai penanda identitas wilayahnya setelah penamaan sungai. Tentunya, hal ini dirasa wajar karena pola penamaan wilayahnya masih seputar lingkungan sekitar daerah aliran sungai. Selain itu, ada pula pola penamaan dari pohon bukan kayu, seperti pohon Podis (Desa Empodis), pohon Kembayau (Desa Sungai Kembayau), pohon Belungai (Desa Balai Belungai), pohon Malenggang (Desa Malenggang), pohon Bunggang (Desa Bunggang), pohon Kelompu (Desa Kelompu), pohon Beringin (Desa Beringin), pohon Sanggau (Kabupaten Sanggau), dan pohon Sengkuang (Dusun Sengkuang). Semua pohon tersebut termasuk ke dalam pohon hutan. Bahkan, penamaan Kabupaten Sanggau sendiri ternyata diambil dari penamaan pohon. Hal ini semakin menegaskan bahwa Kabupaten Sanggau memang sangat identik dengan banyaknya pohon kayu dan pohon hutannya. Penamaan yang diambil dari penamaan pohon ini sangat bagus karena dapat sekaligus sebagai penanda identitas maupun pelestarian pohon itu sendiri supaya keberadaannya tetap dilindungi.

Tabel 2. Daftar Kategori Penamaan Pohon atau Tanaman

No.	Jenis Toponim	Toponim	Nama Generik	Nama Spesifik	Makna
1	Dusun	Sengkuang		Sengkuang: nama pohon	Nama pohon di pinggir sungai
2	Kabupaten	Sanggau		Sanggau: nama pohon	Nama pohon Sanggau
3	Desa	Lalang		Lalang: alang-alang	Banyak alang-alang
4	Desa	Beringin		Beringin: nama pohon	Nama pohon Beringin
5	Desa	Upe		Upe: nama pohon kayu	Nama pohon kayu Upe
6	Desa	Subah		Subah	Nama pohon kayu Ubah
7	Desa	Kelompu		Kelompu: nama pohon	Nama pohon di pinggir Sungai Maja
8	Desa	Tanap		Tanap: nama pohon kayu	Nama pohon kayu Tanapnt yang tumbuh di sepanjang jalur sungai
9	Desa	Bunggang		Bunggang: nama pohon	Nama pohon besar yang ada di tengah-tengah desa
10	Desa	Malenggang		Malenggang: nama pohon	Nama pohon yang banyak tumbuh di desa
11	Desa	Balai Belungai	Balai: bangunan rumah tempat pertemuan	Belungai: nama pohon hutan	Tempat pertemuan di daerah pohon hutan

No.	Jenis Toponim	Toponim	Nama Generik	Nama Spesifik	Makna
12	Desa	Sungai Kembayau	Sungai	Kembayau: nama pohon	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon Kembayau
13	Desa	Sungai Muntik	Sungai	Muntik: nama tanaman sejenis bambu yang memiliki batang tegak lurus	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh tanaman Muntik
14	Desa	Tanjung Sekayam	Tanjung: daratan yang menjorok ke sungai	Sekayam: sungai yang memiliki banyak batang kayu ayam	Daratan yang menjorok ke sungai yang memiliki banyak batang kayu ayam
15	Desa	Tapang Dulang	Tapang: pohon kayu yang besar, indah, bersih, dan tegap	Dulang: alat untuk mengayak emas	Tempat mengayak emas yang terbuat dari pohon kayu
16	Desa	Empodis	Em: sungai	Podis: nama pohon	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon Podis
17	Desa	Tanjung Bunut	Tanjung: daratan yang menjorok ke sungai	Bunut: nama kayu Bunut	Daratan yang menjorok ke sungai yang banyak tumbuh kayu Bunut
18	Desa	Temiang Mali	Temiang: Bambu	Mali: pohon kayu Mali	Bambu yang terbuat dari pohon kayu Mali
19	Desa	Sejuah	Sei: sungai	Juah: pohon kayu Meranti	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon kayu Meranti
20	Desa	Semongan	Sei: sungai	Mongan: nama pohon	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon kayu Mongan
21	Desa	Sungai Dangin	Sungai	Dangin: kayu kecil-kecil berdaun lebar	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon kayu Dangin

Di sisi lain, ada pula penamaan berdasarkan penamaan tumbuhan. Misalnya, Desa Lalang dan Desa Sungai Muntik. Desa Lalang diambil dari penamaan tumbuhan alang-alang. Tumbuhan tersebut merupakan rumput yang tumbuh secara liar dan tersebar luas di hutan. Desa Sungai Muntik diambil dari penamaan tumbuhan sejenis bambu yang berbatang tegak lurus dan berada di dekat daerah aliran sungai. Kedua penamaan tersebut menandakan bahwa pola penamaan tumbuhan ini juga masih berada di lingkungan hutan dan sungai. Meskipun penamaan tumbuhan yang teridentifikasi tidak banyak, tetapi pengambilan penamaan tumbuhan

ini juga menjadi penanda identitas sebagai tempat yang banyak terdapat tumbuhan tersebut. Jika dilihat dari kedua karakteristik pohon dan tumbuhan yang dijadikan penamaan wilayah administrasi, dapat diketahui bahwa pohon dan tumbuhan yang ada termasuk ke dalam pohon dan tumbuhan yang relatif alami atau bebas. Dari hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat di Kabupaten Sanggau tidak memiliki budaya bercocok tanam dan masih hidup di alam yang asri karena banyak pohon dan tanaman di hutan.

Kategori Penamaan Buah

Penamaan wilayah administrasi yang teridentifikasi selanjutnya adalah kategori penamaan buah. Dari Tabel 3 di bawah ini, dapat diketahui bahwa jumlah kategori penamaan buah ini tidak sebanyak kategori penamaan sungai dan pohon atau tanaman. Meskipun demikian, kategori penamaan buah dapat dikatakan terbanyak ketiga di antara kategori penamaan lainnya di Kabupaten Sanggau. Hampir mirip dengan kategori penamaan pohon atau tanaman, kategori penamaan buah ini juga masih berada di lingkungan sungai dan hutan. Beberapa buah yang berada di lingkungan sungai adalah buah mawang (Desa Sungai Mawang), buah sengkuang (Desa Sungai Sengkuang), buah manggis (Desa Semanggis Raya), dan buah alai (Desa Sei Alai). Beberapa buah tersebut penamaannya digabungkan dengan sungai karena letak dari buah tersebut tidak jauh dari sungai. Hal tersebut berbeda dengan buah binjai (Desa Binjai), buah Cempedak (Desa Cempedak), buah pisang (Desa Pisang), dan buah jeruk (Desa Penyalimau). Beberapa buah ini tidak digabungkan dengan unsur sungai karena lokasi tumbuhnya tidak di dekat sungai, melainkan di hutan. Kedua pola penamaan tersebut dapat menandakan lokasi tumbuhnya buah. Apabila buah berada di dekat sungai, maka penamaan wilayah administrasi menggabungkan unsur sungai. Sebaliknya, apabila buah tumbuh di hutan, maka penamaan wilayah administrasinya tidak ada unsur sungai atau hutan sekalipun.

Tabel 3. Daftar Kategori Penamaan Buah

No.	Jenis Toponim	Toponim	Nama Generik	Nama Spesifik	Makna
1	Desa	Bagan Asam	Bagan: pondok sementara	Asam: nama buah	Pondok sementara atau tempat persinggahan yang banyak tumbuh buah asam
2	Desa	Penyalimau	Penya: banyak	Limau: buah jeruk	Banyak buah jeruk
3	Desa	Sungai Mawang	Sungai	Mawang: buah besar dengan kulit tebal	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon buah Mawang
4	Desa	Sungai Sengkuang	Sungai	Sengkuang: buah rasa asam manis	Sungai yang pinggirnya banyak tumbuh pohon buah Sengkuang
5	Desa	Semanggis Raya	Raya: besar	Semanggis: sungai buah manggis	Sungai besar yang pinggirnya banyak tumbuh pohon buah manggis
6	Desa	Pisang		Pisang: nama buah	Tempat yang banyak tumbuh pohon buah pisang

No.	Jenis Toponim	Toponim	Nama Generik	Nama Spesifik	Makna
7	Desa	Cempedak		Cempedak: nama buah sejenis nangka	Tempat yang banyak tumbuh pohon buah cempedak
8	Desa	Sei Alai	Sei: sungai	Alai: buah petai berwarna hitam dan isinya keras	Sungai yang memiliki banyak buah Alai
9	Dusun	Binjai		Binjai: nama buah yang ada di hutan	Tempat yang banyak tumbuh pohon buah cempedak

Selain itu, pada tabel kategori penamaan buah di atas juga dapat dilihat bahwa beberapa buah yang dijadikan penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau ini termasuk ke dalam buah yang tumbuh alami tanpa adanya penanaman. Hal tersebut menguatkan asumsi bahwa budaya di Kabupaten Sanggau lebih pada berkebun dan bukan pada bercocok tanam. Hal yang membedakan berkebun dan bercocok tanam adalah prosesnya. Menurut pengakuan masyarakat setempat, maksud dari berkebun adalah mengambil hasil alam yang ada di hutan. Tidak ada proses menanam atau memelihara. Hal ini berbeda dengan bercocok tanam yang membutuhkan penanaman dan pemeliharaan. Dalam hal ini, pendatang dari Jawa sebagai transmigran melakukan kegiatan bercocok tanam, sedangkan masyarakat asli setempat lebih condong pada melakukan kegiatan berkebun.

Tidak hanya itu, ada pula pembeda berkebun dan bercocok tanam jika dilihat dari tempatnya. Orang melakukan kegiatan berkebun di ladang atau hutan, sedangkan orang bercocok tanam di sawah atau kebun. Dua hal ini sekaligus membedakan antara masyarakat asli setempat dengan masyarakat pendatang dari program transmigrasi. Kondisi demikian membuat kategori penamaan buah ini juga dapat menjadi penanda identitas budaya masyarakatnya.

Kategori Penamaan Bahasa

Hal yang tidak kalah penting dalam pembahasan penelitian ini adalah klasifikasi penggunaan bahasa dalam penamaan wilayah administrasi. Hal ini penting karena bahasa dapat menunjukkan identitas suatu wilayah. Adanya dominasi penggunaan bahasa tertentu dalam penamaan wilayah administrasinya menandakan dominasi suku dan budayanya pula di wilayah tersebut.

Pada Tabel 4 di bawah ini, dapat terlihat bahwa penamaan wilayah administrasi yang berhasil teridentifikasi berdasarkan asal bahasanya ini menggunakan empat bahasa, yaitu bahasa Dayak, Melayu, Jawa, dan Indonesia. Bahasa Dayak mendominasi penamaan wilayah administrasi yang teridentifikasi di Kabupaten Sanggau. Hal yang menarik dalam kategori penamaan bahasa ini adalah Kabupaten Sanggau memiliki 25 suku Dayak (Yas, Abdias, 2009) sehingga setiap suku Dayak tersebut menyebut penggunaan bahasanya sama seperti penamaan sukunya. Misalnya, masyarakat suku Dayak Ribun mengaku menggunakan bahasa Ribun, masyarakat suku Dayak Desa mengaku menggunakan bahasa Desa, masyarakat suku Dayak Jangkang mengaku menggunakan bahasa Jangkang. Padahal, bahasa yang teridentifikasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kabupaten Sanggau baru tiga bahasa, yaitu bahasa Melayu, Galik, dan Ribun (Sunendar, 2019). Hal ini menandakan bahwa perlu adanya

penelitian pemetaan bahasa untuk dapat membuktikan pengakuan masyarakat terhadap penggunaan bahasanya. Dengan demikian, pada penelitian ini penggunaan bahasa suku Dayak yang beragam masih dikategorikan satu bahasa, yaitu bahasa Dayak. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan melihat pola kategori penamaan dari suku lain di luar suku Dayak.

Tabel 4. Daftar Kategori Penamaan Bahasa

No.	Jenis Toponim	Toponim Bahasa Dayak	Toponim Bahasa Melayu	Toponim Bahasa Jawa	Toponim Bahasa Indonesia
1	Desa	Pampang Dua	Balai Belungai	Bhakti Jaya	Kampung Baru
2	Desa	Sungai Kembayau	Balai Tinggi	Mukti Jaya	Harapan Makmur
3	Desa	Kuala Rosan	Meliau Hilir	Tri Mulya	Sungai Batu
4	Desa	Kuala Buayan	Nanga Biang	Suka Mulya	Maju Karya
5	Desa	Meranggau	Lintang Pelaman	Tunggal Bhakti	Pusat Damai
6	Desa	Penyalimau	Sei Alai		
7	Desa	Lape	Lintang Kapuas		
8	Desa	Sungai Mawang	Tanjung Kapuas		
9	Desa	Engkode	Ilir Kota		
10	Desa	Layak Omang	Tapang Dulang		
11	Desa	Upe	Semanggis Raya		
12	Desa	Empodis	Semuntai		
13	Desa	Bonti	Balai Sebut		
14	Desa	Kampuh	Sebuduh		
15	Desa	Tanjung Bunut	Sejuah		
16	Desa	Emberas	Semongan		
17	Desa	Temiang Mali	Balai Karangan		
18	Desa	Temiang Taba	Sei Tekam		
19	Desa	Kelompu			
20	Desa	Tanap			
21	Desa	Kuala Dua			
22	Desa	Thang Raya			
23	Desa	Empoto			
24	Desa	Sungai Dangin			
25	Desa	Noyan			
26	Desa	Entikong			
27	Kecamatan	Toba			
28	Kecamatan	Jangkang			
29	Kecamatan	Parindu			
30	Dusun	Landau			
31	Dusun	Entabang			
32	Dusun	Mangkau			

Tidak hanya menggunakan bahasa Dayak, penamaan wilayah administrasi di Kabupaten juga menggunakan bahasa Melayu dan Jawa. Penamaan wilayah administrasi yang menggunakan bahasa Melayu di antaranya Desa Balai Belungai, Desa Sejuah, Desa Sei Alai, dan lain sebagainya. Penamaan berbahasa Melayu ini dapat ditandai dengan adanya unsur *balai*

atau *sei* dalam penamaannya. Kedua unsur tersebut menjadi penanda identitas masyarakat Melayu karena memang di desa-desa tersebut didominasi oleh masyarakat Melayu. Hal yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan pada penamaan wilayah administrasi yang menggunakan bahasa Jawa. Seperti yang diketahui bersama, masyarakat Jawa banyak mengikuti program transmigrasi sehingga keberadaannya menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Sanggau. Penanda identitas masyarakat Jawa dalam penamaan wilayah administrasi juga terlihat jelas, seperti Desa Bhakti Jaya, Desa Mukti Jaya, Desa Tri Jaya, Desa Suka Mulya, dan Desa Tunggal Bhakti. Penamaan berbahasa Jawa ini dapat ditandai dengan adanya unsur *bhakti* atau *mulya* dalam penamaannya. Penamaan bahasa Jawa tersebut sesuai dengan dominasi masyarakat Jawa di desa-desa tersebut.

Selain itu, keberagaman masyarakat juga dapat terlihat dari penamaan wilayah administrasinya. Hal ini ditandai dari penamaan wilayah administrasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Ada lima wilayah administrasi pada tingkat desa yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Desa Kampung Baru, Desa Harapan Makmur, Desa Sungai Batu, Desa Maju Karya, dan Desa Pusat Damai. Sebagian besar penamaan tersebut memiliki makna harapan terhadap desa tersebut. Selain itu, sebagian besar juga termasuk ke dalam desa hasil penggabungan dari beberapa desa dan/atau dusun. Hal tersebut diketahui dari adanya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 1987 yang isinya mengenai penggabungan beberapa dusun dan/atau desa menjadi satu (Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2015). Penggunaan bahasa Indonesia juga menandakan bahwa karakteristik masyarakatnya heterogen antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli setempat yang berada pada wilayah baru. Meskipun penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi jalan tengah penamaan dalam masyarakat heterogen, tetapi pola penamaannya menjadi berbeda dari pola penamaan lainnya yang sudah ada sebelumnya. Perubahan pola penamaan dari sungai, pohon atau tanaman, dan buah menjadi ke pola penamaan harapan. Adanya perubahan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah karena penanda identitasnya masih terlihat sebagai wilayah masyarakat heterogen. Akan tetapi, jika masih ada penamaan yang menunjukkan kekhasan wilayah tersebut dari unsur alam menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan pengambilan penamaan dari unsur alam juga dapat dijadikan sebagai upaya dokumentasi sehingga kekhasan tersebut dapat terus diketahui masyarakat melalui penamaan wilayah administrasi walaupun keberadaannya sulit ditemukan atau bahkan tidak ada lagi.

Penamaan di Ruang Publik

Pembahasan juga dilanjutkan dengan melihat penggunaan penamaan wilayah administrasi di ruang publik. Hal yang dimaksud dari ruang publik ini dapat mengacu ke berbagai hal. Mulai dari penamaan pada papan petunjuk arah, penamaan tempat, maupun penamaan yang terletak di jalan umum dan dapat dilihat orang banyak. Penggunaan penamaan ini dilihat menggunakan sudut pandang aturan pembakuan nama rupabumi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi maupun sudut pandang penulisan kata menurut kaidah bahasa Indonesia dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, 2016). Berikut di bawah ini salah satu contoh penamaan wilayah administrasi yang penulisan kata dalam penamaannya sudah sesuai.



Gambar 1. Penamaan Kelurahan Ilir Kota di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Pada gambar di atas, dapat terlihat bahwa penulisan kata dalam penamaan wilayahnya adalah Kelurahan Ilir Kota. Dalam hal ini, kata *kota* yang dimaksud bukanlah tingkat wilayah administrasi. Makna *kota* dalam penamaan tersebut berasal dari penamaan sebuah rumah Kouta pada masa penjajahan Belanda. Dengan adanya berbagai peraturan yang ada, kata *kouta* disederhanakan menjadi *kota* supaya memudahkan masyarakat. Sementara itu, kata *ilir* bermakna *hilir* sebagai penanda penunjuk arah. Dalam bahasa Melayu, huruf *h* seringkali mengalami pelesapan sehingga *hilir* menjadi *ilir*. Dengan demikian, unsur spesifiknya adalah *kota*, sedangkan unsur generiknya adalah *ilir*. Penulisan penamaan wilayah administrasi tersebut sudah sesuai aturan penamaan rupabumi maupun kaidah bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan nama spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah, seperti Jawa Timur, Kebayoran Baru, dan sebagainya.



Gambar 2. Penamaan Desa Tanjung Sekayam dalam papan nama Puskesmas

Sebaliknya, ada pula penamaan wilayah administrasi yang penulisan kata dalam penamaannya belum sesuai. Salah satu contohnya adalah Desa Tanjung Sekayam. Unsur generiknya adalah *tanjung*, sedangkan unsur spesifiknya adalah *sekayam*. Makna dari *tanjung* ini adalah daratan yang menjorok ke sungai. Sementara itu, *sekayam* berarti batang kayu ayam. Kedua unsur tersebut apabila digabungkan memiliki makna wilayah daratan yang menjorok ke sungai dan di sungai tersebut banyak terdapat batang kayu ayam. Dalam hal ini, penulisan penamaan wilayahnya seharusnya Desa Tanjungsekayam. Hal ini disebabkan nama generik banyak menjadi nama spesifik dalam rupabumi. Misalnya, Kota Bukittinggi, Kota Gunungsitoli, dan sebagainya. Penggabungan unsur spesifik dengan unsur generik menjadi hanya unsur spesifik saja dimaksudkan untuk menjadi pembeda antara rupabumi dari penamaan wilayah dengan rupabumi dari penamaan alam. Meskipun memuat unsur alam, penamaan wilayah harus memiliki karakteristiknya sendiri supaya masyarakat tidak bingung membedakan antara penulisan alam dan wilayah walaupun katanya sama. Salah satu solusinya adalah

menggabungkan unsur spesifik dan unsur generik menjadi unsur spesifik. Kaidah penulisan penamaan yang belum sesuai seperti ini memang masih banyak ditemukan di Kabupaten Sanggau sehingga pemerintah daerah setempat perlu merevisi penulisan penamaan wilayah administrasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau memiliki pola penamaan yang mengacu pada unsur alam. Hal tersebut diketahui dari adanya dominasi pola penamaan wilayah administrasi yang menggunakan penamaan sungai, pohon atau tanaman, dan buah. Meskipun demikian, ada pula pola penamaan wilayah yang menggunakan penamaan suku, benda, nama orang, tempat, hingga binatang walaupun jumlahnya sedikit. Selain itu, penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau berasal dari bahasa Dayak, Melayu, Jawa, dan Indonesia. Belum adanya penelitian yang mengkaji perbandingan bahasa di antara 25 suku Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau membuat penelitian ini masih menyamakan asal bahasa selama memiliki suku yang sama pula. Bahasa Dayak mendominasi sebanyak 25 penamaan wilayah administrasi yang disusul bahasa Melayu sebagai penggunaan bahasa terbanyak kedua sebanyak 18 penamaan, serta bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai penggunaan bahasa paling sedikit jumlahnya sebanyak lima penamaan masing-masingnya. Dominasi bahasa dalam penamaan wilayah administrasi menjadi penanda identitas masyarakat di wilayah administrasi tersebut pula. Misalnya, Desa Entikong yang berasal dari bahasa Dayak memiliki dominasi masyarakat Dayak, Desa Sei Alai yang berasal dari bahasa Melayu memiliki dominasi masyarakat Melayu, Desa Tri Mulya yang berasal dari bahasa Jawa memiliki dominasi masyarakat Jawa, dan Desa Harapan Makmur yang berasal dari bahasa Indonesia memiliki karakteristik masyarakat heterogen atau dapat dikatakan dominasi masyarakat pendatang selain Melayu dan Dayak.

Di samping itu, penulisan penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau dapat disimpulkan masih banyak yang belum mematuhi aturan penamaan rupabumi maupun kaidah bahasa Indonesia. Sebagian besar ketidaksesuaian disebabkan masih terpisahnya nama generik dan nama spesifik dalam penamaan wilayah. Misalnya, Desa Kuala Rosan yang seharusnya Desa Kualarosan, Desa Sei Alai yang seharusnya Seialai, Desa Sungai Batu yang seharusnya Desa Sungaibatu, dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membedakan penamaan rupabumi dari penamaan alam dan wilayah walaupun kata yang digunakan sama. Bahkan, banyak pula penamaan wilayah yang belum konsisten, seperti adanya Desa Sungai Daging, Desa Sei Tekam, Desa Entikong, dan Desa Empoto. Dalam hal ini, penulisan *sei*, *en*, maupun *em* memiliki makna sungai. Hal tersebut dibedakan berdasarkan dominasi masyarakat dan penggunaan bahasanya. Apabila ketiga karakteristik tersebut diaplikasikan dalam penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, maka penanda identitas dalam penamaan wilayah administrasi menjadi lebih jelas.

CATATAN

Penulis berterima kasih kepada mitra bebestari yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. (2021). *Gazeter Republik Indonesia*. Badan Informasi Geospasial.
- Erikha, F., Budiono, S., Dewi, S., Saputri, T. D., Yulianti, S., & Ferdiansyah, H. (2021). *Buku Petunjuk Teknis Penelitian Toponimi*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Heigham, Juanita and Croker, R. A. (ed). (2009). *Qualitative Research in Applied Linguistic: A Practical Introduction*. Palgrave Macmilan. <https://doi.org/10.1057/9780230239517>
- Izar, J., Kusmana, A., Triandana, A., & Jambi, U. (2021). Toponimi dan Aspek Penamaan Desa-Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia (Diglosia)*, 5(1), 89–99.
- Jakir, Z., Hecimovic, Z., & S. Z. (2011). Place Names Ontologies. In *Advances in Cartography and GIScience* (pp. 331–348). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19143-5_19
- Oktaviana, E. (2020). Toponimi Penamaan Desa di Kecamatan Kebomas Gresik Jawa Timur (Kajian Linguistik Antropologi). *Jurnal Sapala*, 7(1), 1–5.
- Pemerintah Kabupaten Sanggau. (2015). *Laporan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sanggau*. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, (2008).
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Permata, C., & Syahrani, A. (2015). Bentuk Dan Makna Penamaan Tempat Di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(1).
- Sunendar, D. (2019). *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* (6th ed.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tent, J. (2015). Approaches to Research in Toponymy. In *Names: A Journal of Onomastics*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1179/0027773814Z.000000000103>
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
- UNGEGN. (2006). *Manual for the National Standardization of Geographical Names*. United Nations Group of Expert on Geographical Names.
- Yas, Abdias, dkk. (2009). *Mengenal Sistem Peradilan Adat 25 Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau*. Lembaga Bela Banua Talino (LBBT).